

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN
DAERAH (DPD) DALAM MENGAJUKAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN
PRESIDENSIL
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Strata Satu S.1 Hukum (S.H)**



OLEH :

AKBAR MUHAMMAD
NIM : 11627104353

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU

1442 H/2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil Indonesia”**, yang ditulis oleh:

Nama : **Akbar Muhammad**
 NIM : **11627104353**
 Program studi : **Ilmu Hukum**

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi

Dr. Abu Samah, MH

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia"* yang ditulis oleh :

Nama : **AKBAR MUHAMMAD**

NIM : 11627104353

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Juni 2021

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua

Firdaus, SH., MH

Sekretaris

Basir, SHL., MH

Penguji I

Dr. Abu Samah, MH

Penguji II

Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005



ABSTRAK

Akbar Muhammad (2021) : Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil Indonesia

Dalam menjalankan kewenangannya, terdapat beberapa perbedaan antara kedua lembaga yang ini, walaupun kedua lembaga ini sama-sama menjadi lembaga legislatif di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dari pada Dewan Perwakilan Daerah, sehingga politik bikameral di Indonesia menjadi Soft Bikameral, karena adanya lembaga yang mempunyai kewenangan lebih tinggi dibanding lembaga lainnya walaupun kedua lembaga tersebut sama-sama sebagai lembaga legislatif di Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan.

Melalui wawancara dan observasi dilapangan penulis memperoleh hasil setelah Pendekatan Per Undang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Sejarah dan Pendekatan Perbandingan Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun Tugas dan Wewenang Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil Indonesia sudah tertuang pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD diserahkan kepada DPR. Karena kedudukannya setara dengan lembaga DPR. Akan tetapi pada kenyataan lembaga DPD tidak menjalankan fungsinya sebagaimana amanat awal pembentukannya. Adapun Kendala tugas dan wewenang legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem Pemerintahan Presidensil antara lain adalah Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dibatasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan lain-lain.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia ”**

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih kepada orang tuaku tercinta Ayahanda Jarlinus dan Ibunda Assaiti yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk penelitian ini, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, S.Ag M. Ag , selaku Rektor UIN Suska Riau.
Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA, selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd, selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau. Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph. D, selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau. Dan beserta stafnya.
2. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum. Bapak Dr. Drs.H. Heri Sunandar. M.CL , selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. Wahidin, M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Magfirah. MA., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Firdaus,SH, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abu Samah, MH, selaku pembimbing penulis yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, perhatian, serta bantuannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs Rahman Alwi, MA selaku penasehat akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini.
8. Untuk keluargaku tercinta, Ayahanda Khaizir dan Ibunda Sabariah serta kakakku tersayang Rizca Firliani dan abangku Robi Ari Kusuma dan Hasbi Hamidi yang sangat memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan kepada seluruh keluarga Besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Untuk sahabat terbaikku .
10. Untuk Grup Konsultasi yang telah memberikan semangatnya dan rekan terbaik dalam menulis skripsi ini.
11. Sahabat seperjuanganku yang selalu memberi do'a dan semangat yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi serta menjadi penyemangat terbaik bagi penulis.
12. Tidak terkecuali pada semua pihak yang telah memberi bantuan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khazanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 24 Juni 2020

Penulis,

AKBAR MUHAMMAD
NIM. 11627104353

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Metodologi penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH	
A. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Daerah	20
1. Sejarah Dewan Perwakilan Daerah.....	20
2. Struktur Organisasi Dewan Perwakilan Daerah	24
B. Dasar Hukum Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah.	26
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Negara Hukum	29
B. Teori Perundang-Undangan.....	34
C. Teori Pemisahan Kekuasaan.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Mengajukan Rancangan Undang-undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia	42
B. Kendala Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Mengajukan rancangan undang-undang dalam sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki paham konstitusionalisme yaitu pembatasan kekuasaan. Berdasarkan ide Konstitusionalisme, semua pemegang kekuasaan harus dibatasi sehingga tidak ada satu lembaga pun memiliki kekuasaan tanpa batas.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusionalisme diartikan sebagai suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat

Indonesia adalah Negara Hukum². Setiap pelaksanaan pemerintahan di Negara Indonesia haruslah berdasarkan kepada kaedah-kaedah hukum yang tertuang dalam aturan-aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Aturan-aturan yang terbentuk dan dituangkan dengan tertulis disebut dengan Undang-Undang. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 yang dimaksud dengan undang-undang yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden dengan kata lain, dibentuk atas persetujuan bersama antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif.

Indonesia sebagai Negara Hukum menganut sistem pemerintahan Presidensial, dan sebagai negara hukum, untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam menjalankan pemerintahan, di Indonesia juga

¹ Elydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2010) Cet. Ke-1 h. 13

² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengenal adanya pembagian kekuasaan dalam melaksanakan ketatanegaraan. Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan Trias Politika seperti halnya yang tertuang dalam ajaran Montesquieu. Menurut Montesquieu dalam sistem suatu pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah, baik mengenai fungsi, maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakannya:

- a. Kekuasaan legislatif, dilaksanakan oleh suatu badan perwakilan rakyat (Parlemen)
- b. Kekuasaan eksekutif, dilaksanakan oleh pemerintah (Presiden atau raja dengan bantuan Menteri-Menteri atau kabinet)
- c. Kekuasaan yudikatif, dilaksanakan oleh badan peradilan (Mahkamah Agung dan pengadilan bawahannya).

Isi ajaran Montesquieu ini adalah mengenai pemisahan kekuasaan negara (*The separation of Power*) yang lebih terkenal dengan istilah “*Trias Politika*” istilah mana diberikan oleh Immanuel Kant.

Keharusan pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga jenis itu adalah bertugas agar tindakan sewenang-wenang dari raja dapat dihindarkan.³

Lembaga legislatif di Indonesia di tingkat pusat terbagi dalam dua lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang menyatu dalam satu lembaga yaitu Majelis Perwakilan Rakyat (MPR). Adanya pembagian dua lembaga di MPR ini sering disebut dengan istilah Bikameral. Pengertian Bikameral adalah sistem

³ C.S.T Kansil, “*Hukum Tata Negara di Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*”, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), h.110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemerintahan yang terdiri dari dua kamar yang memiliki fungsi masing-masing, hal tersebut diatur di dalam Undang –undang Dasar 1945 yang menjadi Konstitusi di Indonesia. Negara Indonesia dalam menjalankan sistem pemerintahannya memiliki sebuah konstitusi yang dikenal dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).⁴

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah sebuah lembaga perwakilan daerah lahir dengan pondasi hukum yang kuat melalui amandemen yang ketiga UUD 1945, dengan nama urusan golongan dan utusan daerah, kemudian amandemen ke-Empat UUD 1945 Pasal 2 ayat (1): Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.⁵ Hadirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 22 C dan 22 D.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah tersebut dipilih dalam Pemilihan Umum (PEMILU) yang dilaksanakan 5 (lima) Tahun sekali. Anggota yang terpilih akan duduk di lembaga tersebut dan menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan aturan yang berlaku. Mengenai tugas dan fungsinya, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

⁴ Winarno Narmoatmojo, *Pancasila dan UUD 1945*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 111.

⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Perubahan Ke-Empat (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016), cet. Ke-16, h. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum dan lembaga dewan perwakilan daerah berdasarkan perubahan ketiga uud 1945 telah merubah sistem perwakilan indonesia dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Karna kedua kamar tersebut tidak memiliki kekuasaan yang berimbang, sehingga dikatakan sistem soft bikameral, menyangkut sistem parlemen tersebut ada dua alasan fundamental dalam pembentukan nya:

Pertama: penciptaan mekanisme check and balance dalam parlemen, guna menghindari kesewenangan dari salah satu lembaga negara, penyalahgunaan lembaga tertentu oleh orang-perseorangan, dan monopoli dalam pembentukan suatu undang-undang

Kedua: meningkatkan derajat keterwakilan, terutama dalam konteks distribusi yang tak merata antar wilayah dan tajamnya pembilahan sosial dalam masyarakat seperti yang dialami indonesia. Perubahan prinsip yang mendasari bangunan parlemen indonesia berdaarkan perubahan uud 1945 berkembang dari antara prinsip parlemen dan pembagian kekuasaan (*distribusi power*) ke prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan *check and balance*.

Adapun maksud pembentukan dpd sebagai lembaga negara dalam struktur ketatanegaraan indonesia adalah:

- a. Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah-daerah
- b. Meningkatkan agresi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah-daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.⁶

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22d terdapat tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah sebagai berikut⁷ :

1. Dewan perwakilan daerah dapat mengajukan kepada dewan perwakilan rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Dewan perwakilan daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah ; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah daerah; serta memberikan pertimbangan kepada dewan perwakilan rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama
3. Dewan perwakilan daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran

⁶ DR.H.Abu Samah,MH, "*Hukum Dan Lembaga Negara*", (Pekanbaru, Suska Press, 2019), hal.37.

⁷ Pasal 22d ayat (1,2,3) Undang-Undang Dasar 1945

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada dewan perwakilan rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk di tindak lanjuti.

Dalam Undang-Undang MD3 Nomor 17 tahun 2014 juga terdapat tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah sebagai berikut:⁸

- a. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;
- b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e. Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 pasal 249

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- f. Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
- g. Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN;
- h. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK; dan
- i. Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa perbedaan antara kedua lembaga yang ini, walaupun kedua lembaga ini sama-sama menjadi lembaga legislatif di Indonesia. Adanya perbedaan tugas dan kewenangan ini, membuat adanya perbandingan antara kedua lembaga tersebut, yang mana adanya lembaga yang memiliki kewenangan lebih besar dari lembaga lainnya, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tugas dan kewenangan yang lebih besar dari pada Dewan Perwakilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Daerah, sehingga politik bikameral di Indonesia menjadi Soft Bikameral, karena adanya lembaga yang mempunyai kewenangan lebih tinggi dibanding lembaga lainnya walaupun kedua lembaga tersebut sama-sama sebagai lembaga legislatif di Indonesia.

Lebih sedikitnya kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah salah satunya terlihat dalam hal pembuatan produk perundang-undangan, yang mana adanya keterbatasan dalam pembahasan undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat hanya bisa membahas undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan Daerah saja, sehingga Dewan Perwakilan Daerah tidak bisa ikut dalam semua pembahasan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk dan disahkan di Indonesia, menurut Bagir Manan dalam buku Hukum Tata Negara Indonesia, menyatakan bahwa:

“DPD bukanlah badan legislasi penuh, DPD hanya berwenang mengajukan pembahasan rancangan undang-undang di bidang tertentu saja yang disebut secara enumeratif dalam undang-undang dasar 1945. Terhadap hal lain pembentukan undang-undang hanya ada pada DPR dan pemerintah. Dengan demikian rumusan baru UUD 1945 tidak mencerminkan gagasan mengikutsertakan daerah dalam penyelenggaraan seluruh praktik dan pengelolaan negara.”⁹

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik mengkaji mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan politik bikameral antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah ditinjau dari tugas dan wewenangnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk

⁹ Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2014 : 166

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

melakukan penelitian secara mendalam untuk membahas mengenai masalah ini dengan judul penelitian **“Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil Indonesia”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai permasalahan tinjauan yuridis wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem pemerintahan presidensil Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini :

1. Bagaimanakah kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam mengajukan nancangan undang-undang dalam sistem pemerintahan Presidensil Indonesia ?
2. Apa saja kendala kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam dalam mengajukan rancangan undang-undang dalam sistem pemerintahan Presidensil indonesia ?

D. Tujuan da Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui kewewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kendala kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu:

a. Secara teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara (HTN) terutama yang berkaitan dengan masalah tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.

b. Secara praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum (Hukum Tata Negara), utamanya yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah.
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia

- 3) Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*Input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan suatu aturan yang jelas dan tegas, khususnya dalam hal tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem Pemerintahan Presidensi Indonesia.

E. Metodologi penelitian

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁰

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan.

Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktriner, yaitu penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Atau bisa juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau dokumen, karena penelitian ini

¹⁰ Hajar, *Model-Model Pendekatan dalam penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015), Cet. Ke-1, h. 7-9

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dan bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan peneliti.¹¹ Dan penelitian ini bersifat deskriptif, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Zainuddin Ali bahwa deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan peraturan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹²

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu ;

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Adalah pendekatan terhadap struktur norma dalam wujud tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keberadaan norma tersebut dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), digunakan untuk melihat permasalahan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah ini berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang MD3, dan UUD NRI 1945 di negara Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adalah pendekatan terhadap sumber hukum sekunder yang memberikan berbagai informasi tentang konsep yang akan di teliti. Dalam pendekatan konseptual (*Statute Approach*) ini peneliti akan mengkaji konsep-konsep pemikiran para ahli Hukum Tata Negara

¹¹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.51

¹² Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2009), h.105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah, yang digunakan untuk melihat apakah konsep tugas dan wewenang tersebut sejalan dengan dianutnya paham konstitusionalisme dan negara hukum.

c. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini yang digunakan untuk melihat makna esensial dari pada hak prerogatif agar sejalan dengan sejarah kepemimpinan negara Indonesia.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Gutteridge, perbandingan hukum itu merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.¹³ Pada pendekatan ini penulis akan membandingkan bagaimana penerapan hak prerogatif presiden antara suatu negara dengan negara lainnya yang bertujuan untuk menemukan perbedaan antar dua hal atau lebih sistem hukum terhadap permasalahan hukum secara tersendiri.

2. Bahan hukum dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang

¹³Hajar, *op.cit.*, h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.¹⁴ Dalam penelitian hukum normatif, sumber bahan hukum utamanya adalah data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dalam sebuah penelitian.¹⁵

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.¹⁶ Dan data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data sekunder yang biasanya digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Atau bahan hukum yang bersifat *otoritatif* (mempunyai otoritas). Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain:

¹⁴ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet.I, h. 15-16

¹⁵ Suratman dan Philips Dillah, *op.cit.*, h. 51

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, naskah perubahan I, 19 Oktober 1999
 - 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, naskah perubahan II, 18 Agustus 2000
 - 4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, naskah perubahan III, 9 November 2001
 - 5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, naskah perubahan IV, 10 Agustus 2002
 - 6) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum.¹⁷ Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Seperti buku-buku, jurnal, skripsi, makalah-makalah, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kedudukan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah terhadap kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kegunaannya untuk memberi semacam petunjuk inspirasi kepada penulis, ke arah mana

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis akan melangkah.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta ensiklopedia.¹⁹

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam Rangka memudahkan penulis dalam melakukan sebuah penelitian terutama dalam hal pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis (*Library Research*) mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²⁰ Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada, yang itu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, makalah, literatur dan artikel yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diangkat penulis, sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, h. 29-33

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.149-151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat atau pandangan.²¹

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu bahan hukum. Analisis yang digunakan dalam penelitian normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya dia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.²²

Bahan hukum yang sudah terkumpul, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif²³ untuk memperoleh gambaran suatu keadaan pada waktu tertentu, dan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu suatu metode yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan dari suatu yang umum ke suatu yang khusus. Dan Bahan-bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Dan pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

²¹ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet.I, h. 19

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, h. 152-153

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematis penulis dalam lima (5) bab, masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu sistem dan memiliki ketertarikan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan satu persatu bab tersebut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang, konsep negara hukum, konstitusi dan konstiusionalisme, teori pemisahan dan pembagian kekuasaan,

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan teori-teori khusus yang berkaitan dengan tugas dan wewenang DPD yaitu: Sejarah tugas dan wewenang DPD, pengertian tugas dan wewenang dpd, tugas dan wewenang DPD sebelum dan sesudah di amandemennya Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil penelitian dari rumusan masalah yang berkaitan dengan tugas

dan wewenang DPD .

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH

A. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Daerah

1. Sejarah Dewan Perwakilan Daerah

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa implikasi yang sangat luas terhadap semua lembaga negara. Pada salah satu sisi, ada lembaga negara yang mendapat proporsi baru yaitu dengan bertambahnya kewenangan secara signifikan didalam konstitusi. Sementara disisi lain, ada pula lembaga negara yang mengalami pengurangan kewenangan dibandingkan dengan sebelum dilakukan perubahan. Tidak hanya itu ada pula lembaga negara yang dihilangkan karena dinilai tidak relevan lagi bagi kebutuhan penyelenggaraan negara kedepan. Diantara semua itu, lembaga perwakilan rakyat termasuk yang paling tampak mengalami perubahan dan penataan.²⁴

Hasil amandemen ke 3 Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif. Dewan Perwakilan Daerah bersanding dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam komposisi keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem *bicameral*. Perlekatan dasar konstitusional bagi pembentukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai bagian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan

²⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) Cet. Ke-2 h. 196

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahagian dari pergeseran strategi konstitusionalisasi kehidupan bernegara dan berpemerintahan, sekaligus merupakan salah satu dimensi dan konstitusionalisme yang mencuat dalam rangka reformasi konstitusi di Indonesia²⁵.

Konstruksi *bicameral* itu berangkat dari pandangan bahwa lembaga perwakilan yang ada (untuk sementara ini baru terbatas pada apa yang ada di Jakarta saja) itu mencerminkan dua perwakilan. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang terkonstruksi sebagai wakil dari orang (penduduk). Sementara itu Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga yang terkonstruksi sebagai wakil dari daerah. Konstruksi seperti ini didasarkan pada realitas bahwa Indonesia merupakan negara bangsa yang terdiri dari daerah-daerah. Dengan demikian, diperlukan para wakil yang memperjuangkan kepentingan daerah-daerah. Karena itu prinsip dasar di dalam menentukan jumlah wakil yang mewakili daerah tidak didasarkan pada jumlah penduduk sebagaimana di Dewan Perwakilan Daerah, melainkan pada persamaan pandangan terhadap daerah-daerah itu²⁶.

Dibentuknya lembaga Dewan Perwakilan Daerah sejalan dengan semangat untuk mengakomodasi keterlibatan daerah dalam pengambilan

²⁵ M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2016) Cet. Ke-8 h. 93

²⁶ Kacung Marjan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde baru*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2010) Cet. Ke-1 h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan nasional dan juga sesuai dengan prinsip *check and balances* yang ingin diterapkan oleh pemerintah pada waktu itu.²⁷

Dewan Perwakilan Daerah lahir sebagai bagian dari tuntutan reformasi 1998 dengan tujuan menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik yang berlangsung sejak era orde lama hingga orde baru telah secara signifikan menimbulkan akumulasi kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat, yang sekaligus merupakan indikasi kuat kegagalan pemerintahan pusat dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa ini. Selain itu keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dimaksudkan untuk:

- 1) Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah.
- 2) Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijaksanaan nasional berkaitan dengan negara dan daerah.
- 3) Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang. Selanjutnya kehadiran Dewan Perwakilan Daerah, menurut Ginanjar Kartasasmita sebagai refleksi kritis terhadap eksistensi utusan daerah dan utusan golongan yang mengisi formasi Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sistem keterwakilan di era sebelum.

²⁷ Dayanto Dan Asma Karim, *Efektifitas Fungsi Parlemen Dewan Perwakilan Daerah Dalam Mewakili Aspirasi Masyarakat Daerah Maluku*, Jurnal Tahkim Vol.X No.1 Juni 2014 h. 168

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Mekanisme pengangkatan dari utusan daerah dan utusan golongan bukan saja merefleksikan sebuah sistem yang tidak demokratis; melainkan juga mengaburkan sistem perwakilan yang seharusnya dibangun dalam tatanan kehidupan negara modern yang demokratis. Maka Dewan Perwakilan Daerah lahir sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa wilayah atau daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingannya secara utuh di tataran nasional, yang sekaligus berfungsi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga menurut Ginanjar Kartasmita kehadiran Dewan Perwakilan Daerah mengandung makna bahwa sekarang ada lembaga yang mewakili kepentingan lintas golongan atau komunitas yang sarat dengan pemahaman akan budaya dan karakteristik daerah.²⁸

Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga legislatif juga diikutkan dalam proses pembentukan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan daerah sebagaimana ketentuan pasal 22 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah”. Pasal 22 D ayat (2) menyatakan “Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undangan

²⁸MikiPirmansyah, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum Vol.1 No.1 Juni 2014 h. 164

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama”.

Pada Dasarnya maksud pembentukan Dewan Perwakilan Daerah sebagai wakil daerah adalah untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan daerah serta mewujudkan prinsip *check and balances* antar lembaga legislatif dalam pengambilan kebijakan nasional dalam hal ini yaitu antara Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa kepercayaan rakyat daerah kepada pemerintah pusat, sehingga memperkuat hubungan pusat dan daerah serta menjaga keutuhan dan Kesatuan Republik Indonesia.

2. Struktur Organisasi Dewan Perwakilan Daerah

Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah terdiri atas²⁹:

- a. Pimpinan
- b. Panitia Ad hoc
- c. Badan Kehormatan
- d. Panitia-panitia lain yang diperlukan

²⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007) Cet. Ke-3 h.180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi:

- a. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu
- b. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.³⁰

Sebagai lembaga yang membawa aspirasi daerah, Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi dan wewenang yang diatur didalam Pasal 22 D Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan

³⁰*Ibid* h.181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat dan ketentuannya diatur dengan Undang-Undang.

B. Dasar Hukum Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah.

Berdasarkan Pasal 22 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum”. Kemudian Dalam Pasal 181 dan 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur “peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 dapat menjadi peserta pemilihan umum setelah memenuhi persyaratan³¹:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

³¹ Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Dapat berbicara, membaca dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana.
- h. Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- i. Terdaftar sebagai pemilih
- j. Bersedia bekerja penuh waktu
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala desa dan perangkat desa, Badan permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
- n. Mencalonkan hanya satu lembaga perwakilan
- o. Mencalonkan hanya satu daerah pemilihan dan

Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengalami pengujian di Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XIV/2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018.

A. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum adalah konsep dimana hukum menjadi panglima tertinggi di suatu negara. Munculnya pemikiran tentang negara hukum dimulai sejak abad XIX sampai dengan abad XX. Gagasan pemikiran negara hukum dikemukakan oleh Plato dengan konsep *nomoi* yang berarti penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Pemikiran plato ini bertujuan untuk mencegah kekuasaan sewenang-wenang oleh penguasa negara dan untuk melindungi hak-hak rakyat dari tindakan pemerintahan yang tidak adil dan kesewenang-wenangan yang membuat penderitaan bagi rakyat.³²

Istilah negara hukum di dunia dipadankan dengan bahasa asing yaitu pada negara Eropa Kontinental yang menganut *civil law system* menggunakan istilah negara hukum dengan sebutan *rechtstaat*. Sedangkan negara *anglo saxon* yang menganut *common law system* menggunakan istilah *Rule Of the Law*.

Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian atau pemisahan kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;

³² Nurul Qomar, *Op.Cit* . h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Peradilan tata usaha negara

Sedangkan Albert Van Dicey menyebutkan 3 (tiga) ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *the rule of law* sebagai berikut:

1. Supremasi hukum (*Supremacy of law*), artinya adalah bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum), tidak ada peradilan administrasi,
2. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi setiap orang (*Equality before the law*), dan
3. Konstitusi tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi, konstitusi harus melindunginya (*Constitutional based on individual right*)³³.

Perbedaan istilah yang digunakan oleh yang menganut *civil law system* dan *common law system* dengan penyebutan *rechtstaat* dan *rule of the law* tidak membuat esensi pengertian negara hukum menjadi berbeda. Kedua kelompok negara tersebut sama-sama memahami negara hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap individu masyarakat dan kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah.

Indonesia setelah melakukan Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtstaat*)”.

³³ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:Gramedia, 2017) Cet. Ke-11 h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ridwan. HR konsep negara hukum dalam perkembangannya telah mengalami penyempurnaan yang secara umum dapat dilihat diantaranya:

1. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
2. Bahwa pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif
6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.³⁴

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie ada dua belas prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*the rule of law*, ataupun *rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Dua belas prinsip pokok negara hukum tersebut adalah:

³⁴ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Grapindo Persada, 2006) Cet. Ke.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)
3. Asas Legalitas (*due proses of law*)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-organ eksekutif independen
6. Peradilan bebas tidak memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara
9. Peradilan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat demokratis
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechsstaat*)
12. Transparansi dan Kontrol sosial.³⁵

Negara hukum sangat erat kaitannya dengan Konstitusionalisme.

Konstitusionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi atau (suatu faham / pemikiran / pandangan / aktivitas yang mengatas namakan konstitusi).

Menurut William G. Andrew konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modren pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan (*Consensus*), yaitu:

³⁵ Jimly Ashiddiqie *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah dimuat http://www.Jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada tanggal 1 Januari 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goal of society or general acceptance of the same phillosophy of goverment*),
2. Kesepakatan tentang “*the rule of law*” sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of goverment*),
3. Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*)³⁶

Jimly Ashiddiqie menguraikan bahwa di Indonesia konsensus yang menjaga tegaknya konstitusionalisme adalah lima prinsip dasar pancasila, yang berfungsi sebagai landasan filosofis-filosofis dalam mencapai dan mewujudkan empat tujuan negara. Kelima prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut;

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan berada
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Dan Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Keempat tujuan negara yang harus dicapai meliputi :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Meningkatkan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

³⁶ Beni Ahmad Saebani dan Al Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung:Pustaka Setia, 2016) Cet. Ke-1 h.133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³⁷

Jadi ide konstitusionalisme ini adalah semua pemegang kekuasaan harus dibatasi dan konstitusionalisme ini tidak mengakui keberadaan lembaga yang memiliki kekuasaan tanpa batas. Ide konstitusionalisme ini berasal dari bumi bagian barat dan hampir diterima di seluruh dunia. Dan substansi dan ciri konstitusionalisme adalah menjaga eksistensi konstitusi yang dialaminya membatasi dan mengendalikan segala bentuk penyimpangan kekuasaan.

Di dalam buku Nurul Qomar, Sri Soemantri berpendapat bahwa tidak ada suatu negarapun didunia ini yang tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan Konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Jadi jelas bahwa konsep negara hukum adalah menjadikan hukum sebagai pengawal dari kekuasaan sehingga hak-hak warga sipil terlindungi dan juga tidak terjadi kesewenang-wenangan pemerintah didalam menjalankan kekuasaan. Sedangkan Konstitusionalisme adalah pemahaman terhadap konstitusi dimana pemisahan dan pembagian kekuasaan menjadi fokus utama.

B. Teori Perundang-Undangan

Indonesia sebagai negara hukum mengandung makna bahwa hukum sebagai panglima tertinggi di Indonesia dan menjadi pengatur bagi negara

³⁷*Ibid* h.132-133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia. Dalam kaitannya dengan teori Ilmu perundang-undangan, ada dua istilah:

1. Teori perundang-undangan yang bersifat kognitif berorientasi kepada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman khususnya pemahaman yang bersifat mendasar dibidang perundang-undangan.
2. Ilmu perundang-undangan yang bersifat normatif berorientasi kepada melakukan perbuatan pengaturan, terdiri dari tiga macam yakni proses perundang-undangan, metode perundang-undangan dan teknik perundang-undangan.³⁸

Merujuk kepada teori yang pertama kali disampaikan oleh Hans Kelsen dengan teorinya *Stufentheory*, Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang berlapis-lapis dalam suatu hierarkie (susunan), dalam arti suatu norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar (*Grundnorm*).³⁹

Adolf Merkl mengemukakan teori yang bersumber dari Hans Kelsen mengatakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah *das Doppelte Rechtsantlitz*). Suatu norma hukum itu keatas ia bersumber dan berdasar pada norma yang diatasnya, tetapi kebawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi hukumm dibawahnya sehingga suatu norma hukum

³⁸ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta: Kanisius, 2017) Cet. Ke-16 h. 8

³⁹ *Ibid* h. 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif, oleh karenanya masa berlaku suatu norma hukum itu terganutng pada norma hukum yang berada di atasnya. Apabila norma yang diatas dicabut akan berpengaruh kepada norma yang berada dibawahnya.⁴⁰

Hans Nawiasky berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu:

1. Staatfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara)
2. Staatgrundgesetz (Aturan Dasar Negara/Aturan pokok Negara)
3. Formel Gesetz(Undang-Undang Formal)
4. Verordnung & Autonome Satzung (Aturan pelaksana dan Aturan otonom)

Hans Nawiasky memberikan istilah norma fundamental negara dengan sebutan *Staatfundamentalnorm* bukan *Staatgrundnorm* seperti yang disampaikan Hans Kelsen. Karena *Staatgrundnorm* cenderung kaku dan tidak bisa dirubah. Sedangkan *Staatfundamentalnorm* dapat dirubah karena butuh zaman atau kudeta.

C. Teori Pemisahan Kekuasaan

Dalam suatu negara terdapat berbagai macam bentuk kekuasaan yang memiliki bidang tersendiri, seperti yang dikemukakan oleh pertama kali oleh John Locke, John Locke membagi negara ata 3 kekuaasaan, yaitu eksekutif,

⁴⁰*Ibid* h. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

legislatif, dan federatif, yang masing-masing terpisah-pisah satu sama lain.⁴¹

Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang; kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili (Locke memandang mengadili itu sebagai “*uitvoering*”, yaitu dipandang sebagai termasuk pelaksanaan undang-undang), dan kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).⁴² Namun Montesquieu mengembangkan tentang ajaran ini, yang terkenal dengan ajaran Trias Politikanya, kekuasaan dari setiap negara itu terbagi atas:⁴³

1. Kekuasaan perundang-undangan, Legislatif.

Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak pada suatu badan yang berhak khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka mungkinlah tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Di dalam negara demokrasi yang peraturan perundang-undangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang dan ialah yang dinamakan “Legislatif”. Legislatif ini adalah yang terpenting sekali dalam susunan kenegaraan, karena undang-undang adalah ibarat tiang yang

⁴¹ Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar ilmu politik

⁴² Miriam budiarjo

⁴³ C.S.T Kansil, Ilmu Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menegakkan hidup perumahan negara dan sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat dan negara. Sebagai badan pembentuk undang-undang legislatif hanyalah berhak untuk mengadakan undang-undang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu haruslah diserahkan pada suatu badan lain. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang adalah “Eksekutif”.

2. Kekuasaan Melaksanakan Pemerintah, eksekutif

Kekuasaan menjalankan undang-undang ini dipegang oleh kepala negara sebagai kepala pemerintahan. Kepala negara tentu tidak dapat dengan sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala negara dilimpahkannya (didelegasikannya) kepada pejabat pemerintah atau negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (badan eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan eksekutif.

3. Kekuasaan kehakiman, Yudikatif.

Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan yustisi (kehakiman) ialah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak untuk memberikan peradilan kepada rakyat. Badan yudikatiflah yang berkuasa memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Walaupun paa hakim itu diangkat oleh kepala negara (eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena ia tidak diperintah oleh kepala negara yang mengangkatnya, bahkan ialah badan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhak menghukum kepala negara, jika ia ini melanggar hukum. Berbeda dengan John Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif dalam kekuasaan eksekutif Montesquieu memandang pengadilan itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan oleh ia dalam pekerjaannya sehari-hari sebagai seorang hakim, mengetahui bahwa kekuasaan eksekutif adalah berlainan dari pada kekuasaan pengadilan. Sebaliknya oleh Montesquieu kekuasaan hubungan luar negeri yang oleh John Locke disebut “Federatif” dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif.

Teori Trias Politika mengandung makna pembagian kekuasaan, dengan adanya pembagian kekuasaan dari setiap cabang kekuasaan yang ada, akan terciptanya suatu bentuk kekuasaan yang demokratis, tidak adanya tumpang tindih kekuasaan dalam menjalankan setiap tugas dan wewenang dari setiap kekuasaan.

Pendapat dari Montesquieu di atas, dikenal dengan nama Trias Politika, yang memberi nama demikian adalah Immanuel Kant.⁴⁴ Dalam ajaran ini, kekuasaan dari negara itu dibagi atas 3 yaitu, kekuasaan perundang-undangan, kekuasaan melaksanakan pemerintahan, dan kekuasaan kehakiman. Masing-masing kekuasaan itu dipegang oleh suatu badan yang berdiri sendiri, ini akan menghilangkan kemungkinan adanya tindakan yang sewenang-wenang dari seorang penguasa, atau tegasnya tidak memberikan

⁴⁴ Soehino, Ilmu negara, Liberty, Yogyakarta:1996, Hal 116

kemungkinan dilaksanakannya sistem pemerintahan yang absolut.⁴⁵

Dalam Trias Politika kekuasaan dalam suatu Negara dibagi secara horizontal di antara ketiga cabang tersebut. Dengan kata lain tidak ada kekuasaan yang berada lebih tinggi dari kekuasaan lainnya. Sehingga antara satu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan lainnya saling mengawasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Sehingga Trias Politika merupakan suatu prinsip normatif yang mengartikan bahwa kekuasaan-kekuasaan (atau *function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa, dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.⁴⁶ Adanya pembiasaan kekuasaan ini, menciptakan saling mengawasi antara cabang-cabang kekuasaan yang ada dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menciptakan *check and balance*. Dimana *check and balance* bertujuan untuk menciptakan perimbangan kekuasaan antara cabang-cabang kekuasaan yang ada dalam sebuah negara dan saling mengawasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Namun menurut beberapa ahli lainnya yaitu Van Apeldoorn membedakan pembagian kekuasaan negara sebagai berikut;⁴⁷

- 1) Fungsi atau kekuasaan perundang-undangan.
- 2) Fungsi atau kekuasaan peradilan atau kehakiman.
- 3) Fungsi atau kekuasaan kepolisian.

⁴⁵ Ibid, h 117

⁴⁶ Miriam budiarto, loc cit

⁴⁷ Soehino, op cit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Fungsi atau kekuasaan pemerintahan.

Menurut Jennings membedakan antara pemisahan kekuasaan dalam arti material dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Adapun yang dimaksudkannya dengan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang dengan jelas memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sedangkan yang dimaksudkannya dengan pemisahan kekuasaan dalam arti formal ialah jika pembagian kekuasaan tidak dipertahankan dengan tegas.⁴⁸

Namun Ismail Suny dalam bukunya *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif* mengambil kesimpulan, bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti material itu sepiantasnya disebut *Separation of Power* (Pemisahan Kekuasaan) sedangkan dalam arti formal sebaiknya disebut *Division of Power* (Pembagian Kekuasaan).⁴⁹

⁴⁸ C.S.T Kansil, Supra 15, h. 159

⁴⁹ Ibid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dewan Perwakilan Daerah lahir karena adanya reformasi, demokratisasi arus otonomi daerah, serta adanya sentralisasi di zaman orde baru. Dengan adanya MPRS dan MPR dimasa Orde Baru terdapat didalamnya Utusan Daerah, namun Utusan daerah tidak berfungsi dengan semestinya dan tidak memperjuangkan daerah, hal ini terjadi karena proses pengangkatan tidak di lakukan secara demokrasi.

1. Adapun Tugas dan Wewenang Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil Indonesia sudah tertuang pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD diserahkan kepada DPR. Pasal 162 ayat 1 menyebutkan bahwa: “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Akan tetapi, rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, Presiden, dan DPD.

DPD berhak dan/atau berwenang mengusulkan RUU terkait pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, mestinya lembaga DPD ini berhak ikut memutuskan bersama-sama dengan DPR dalam hal otonomi daerah. Karena kedudukannya setara dengan lembaga DPR. Akan tetapi pada kenyataan lembaga DPD tidak menjalankan fungsinya sebagaimana amanat awal pembentukannya. Padahal anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Adapun Kendala wewenang legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem Pemerintahan Presidensial antara lain adalah Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dibatasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan lain-lain.

B. Saran

Adapun saran dari penulis ataupun peneliti dalam permasalahan Wewenang Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia harus jelas tugas dan wewenangnya dan juga tidak dibatasi wewenangnya, agar tidak adanya ketidakjelasan dalam tugas mereka, maka dari itu harus diperjelas demi berjalannya sistem pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Beni Ahmad Saebani dan Al Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Bandung:Pustaka Setia, 2016) Cet. Ke-1
- C.S.T Kansil, "*Hukum Tata Negara di Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*", (Jakarta, Sinar Grafika, 2007)
- Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, (Jakarta: Total Media, 2009).
- Dayanto Dan Asma Karim, *Efektifitas Fungsi Parlemen Dewan Perwakilan Daerah Dalam Mewakili Aspirasi Masyarakat Daerah Maluku*, Jurnal Tahkim Vol.X No.1 Juni 2014
- DR.H.Abu Samah,MH, "*Hukum Dan Lembaga Negara*", (Pekanbaru, Suska Press, 2019)
- Elydar Chaidir dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, (Yogyakarta: Total Media, 2010)
- GINANJAR Kartasmita, *Dalam Buku Perwakilan Republik Indonesia* (Jakarta: Pelangi Candika, 2006)
- Hajar, *Model-Model Pendekatan dalam penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: Suska Press, 2015)
- Jimly Ashiddiqie *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Makalah dimuat http://www.Jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_NegaraHukum_Indonesia.pdf
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, (Jakarta:Sinar Grafika).
- Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2014 : 166
- Kacung Marjan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde baru*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2010) Cet. Ke-1
- M.Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2016) Cet. Ke-8
- Made Pasek Diantha, *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Jakarta:Kanisius, 2017) Cet. Ke-16
- MikiPirmansyah, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum Vol.1 No.1 Juni 2014
- Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:Gramedia, 2017) Cet. Ke-11
- Moh. Mahfud MD, "Implementasi Ketatanegaraan Saat Ini dan Implikasinya Terhadap Masa Depan Bangsa", Makalah disampaikan dalam Pekan Konstitusi UUD 1945, Amandemen, dan Masa Depan Bangsa" yang diselenggarakan DPD bekerjasama dengan ICIS, Jumat, 3 Pebruari 2012 di Jakarta.
- Nimatul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007) Cet. Ke-3
- Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2006) Cet. Ke.9
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) Cet. Ke-2
- Winarno Narmoatmojo, *Pancasila dan UUD 1945*, (Yogyakarta: Ombak, 2014)
- Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Palu: Sinar Grafika, 2009)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul *"Tinjauan Yuridis Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang Dalam Sistem Pemerintahan Presidensi Indonesia"* yang ditulis oleh :

Nama : **AKBAR MUHAMMAD**
 NIM : 11627104353
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 24 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Basir, SHL., MH

Penguji I
Dr. Abu Samah, MH

Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH



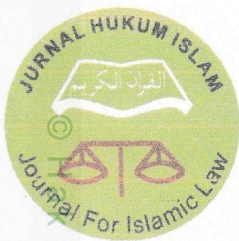






Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum


Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

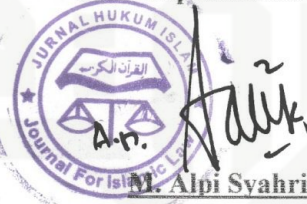
Nama : AKBAR MUHAMMAD
NIM : 11627104353
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM MENGAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL INDONESIA**

Pembimbing : Dr. Abu Samah, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 8 Juli 2020

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
NIP. 198804302019031010

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.